

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

Kesadaran bangsa Indonesia untuk memberi kesempatan khusus bagi perempuan berkembang bersamaan dengan makin besarnya kepedulian dunia terhadap peranan perempuan. Maka peranan perempuan perlu ditingkatkan dengan berbagai usaha. Sehingga perempuan tidak hanya dianggap sebagai pengurus rumah tangga, tetapi perempuan juga dapat meningkatkan keterampilan untuk dapat membantu keluarga dengan memanfaatkan potensi kebudayaan yang ada.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Di dalam teori peran menurut Biddle dan Thomas dalam Sarlito W. Sarwono (1983: 209), memberikan empat peristilahan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil peran dalam interaksi tersebut;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Berdasarkan keempat istilah di atas, dibagi dalam dua golongan yaitu (1) aktor adalah orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu, (2) target atau orang lain adalah orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Berdasarkan teori peran di atas, maka dapat dikatakan bahwa antara aktor dan target saling berhubungan. Di mana dalam hubungan tersebut terdapat kaitan

antara kelompok ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap kebudayaan daerah di Desa Wirata Agung.

1. Tinjauan tentang Potensi Kebudayaan Daerah di Desa Wirata Agung

a. Pengertian Potensi

Potensi merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Pengertian potensi adalah “sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin di mana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada disekitar kita”. (Kartasapoetra, 1987: 56). Sedangkan menurut Slamet Wiyono (2006: 37), “potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut”.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Endra K. Prihadi (2004: 6), bahwa “potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal”. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi adalah sumber kekuatan atau sumber daya yang masih terpendam dan belum dimanfaatkan secara optimal, yang apabila sumber tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan optimal maka sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Potensi yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah kebudayaan daerah yang dimanfaatkan secara cermat oleh sumber daya manusia (SDM) di mana potensi tersebut dapat menjadi suatu keterkaitan yang menyatu dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di keluarga, desa, maupun kecamatan. Kebudayaan daerah tersebut harus dapat dimaksimalkan manfaatnya, dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

b. Pengertian Kebudayaan dan Kebudayaan Daerah

Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat yang berwujud sebagai komunitas desa, atau kota, atau sebagai kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak yang khas. “Kata kebudayaan berasal dari (bahasa Sansekerta) *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal, berdasarkan hal tersebut kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. (Soerjono Soekanto, 2006: 150).

Seorang antropolog, yaitu E. B. Taylor dalam Soerjono Soekanto (2006: 150), memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut: “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Berdasarkan definisi tersebut, kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Pendapat mengenai kebudayaan juga diungkapkan oleh Kuntjaraningrat dalam Rusmin Tumanggor (2010: 19), bahwa “kebudayaan memiliki unsur-unsur yang terperinci, yaitu terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem pencaharian serta sistem teknologi peralatan”. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seseorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik dengan objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Parsudi Suparlan dalam Rusmin Tumanggor (2010: 21), kebudayaan menurutnya adalah “keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat model-model pengetahuan pedoman hidup atau *blue print* yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, serta untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan”. Pendapat ini menjelaskan mengenai kebudayaan yang dijadikan sebagai pedoman hidup atau *way of life* oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah ide berupa model-model pengetahuan yang dijadikan sebagai landasan atau acuan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat melakukan aktivitas sosial, menciptakan materi kebudayaan

dalam unsur budaya universal: agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi serta kesenian.

Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai penting dan fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut harus dijaga agar tidak luntur atau hilang sehingga dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi berikutnya.

Menelaah dari pengertian-pengertian mengenai kebudayaan yang diungkapkan oleh para ahli di atas, maka pengertian kebudayaan daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu ke generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Budaya daerah ini muncul saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain.

Budaya daerah sendiri mulai terlihat berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Hal itu dapat dilihat dari cara hidup dan interaksi sosial yang dilakukan masing-masing masyarakat kerajaan di Indonesia yang berbeda satu sama lain. Dari bermacam-macam budaya daerah tersebut maka munculah sesuatu yang disebut budaya nasional.

c. Unsur-unsur Kebudayaan

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan

yang bersifat sebagai kesatuan. Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan, misalnya Melville J. Herskovits yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (2006: 153), mengajukan empat unsur pokok kebudayaan, yaitu:

1. Alat-alat teknologi;
2. Sistem ekonomi;
3. Keluarga;
4. Kekuasaan politik.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (2006: 153), beliau terkenal sebagai salah seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan, antara lain:

1. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya;
2. Organisasi ekonomi;
3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama;
4. Organisasi kekuatan.

Masing-masing unsur atau beberapa macam unsur-unsur kebudayaan tersebut, untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan dalam unsur-unsur pokok kebudayaan, yang lazim disebut *cultural universals*.

Antropolog C. Kluckhohn di dalam sebuah karyanya yang berjudul *Universal Categories of Culture* yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (2006: 154), telah menguraikan ulasan para sarjana mengenai hal itu.

Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universals*, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi dan sebagainya);
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya);
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan);
4. Bahasa (lisan maupun tulisan);
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya);
6. Sistem pengetahuan;
7. Religi (sistem kepercayaan).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa semua komponen tersebut dimiliki oleh kebudayaan, bahkan menjadi faktor pembangunan dari setiap suku bangsa mulai dari tingkat sektoral, regional, nasional, hingga internasional. Unsur-unsur itu juga akan melintasi batas-batas wilayah tersebut (*cross cultural*).

d. Fungsi Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materil.

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas, untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.

Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Menurut Soerjono Soekanto (2006: 155), teknologi pada dasarnya meliputi paling sedikit tujuh unsur, yaitu:

1. Alat-alat produktif;
2. Senjata;
3. Wadah;
4. Makanan dan minuman;
5. Pakaian dan perhiasan;
6. Tempat berlindung dan perumahan;
7. Alat-alat transportasi.

Menurut Suparlan dalam Rusmin Tumanggor (2010: 95), bahwa “masyarakat majemuk Indonesia, bukan hanya beraneka ragam corak kesukubangsaan dan kebudayaan suku bangsanya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal atau jenjang menurut kemajuan ekonomi, teknologi dan organisasi sosial politiknya”. Tanpa disadari oleh banyak orang Indonesia, sebenarnya dalam masyarakat Indonesia terdapat golongan dominan dan minoritas, sebagaimana yang terwujud dalam interaksi sosial yang mereka lakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi kebudayaan dan kebudayaan daerah adalah untuk menciptakan keragaman hidup bermasyarakat serta dapat menerapkan konsep multikulturisme secara baik dalam sikap kesetaraan dalam bermasyarakat.

e. Jenis-jenis Kebudayaan Daerah di Desa Wirata Agung

Setiap daerah pasti memiliki kebudayaan daerahnya masing-masing. Hal inilah yang memberikan corak yang khas pada tiap daerah tersebut. sama halnya dengan kondisi yang ada di Desa Wirata Agung. Desa Wirata Agung memiliki potensi kebudayaan dalam bidang seni yang cukup banyak, antara lain: seni Gamelan Bali, Tari Bali, Kidung Bali, pementasan Drama Bali dan pementasan Wayang. (sumber: wawancara dengan ketua kelompok ibu PKK).

Kesenian-kesenian tersebutlah merupakan potensi kebudayaan daerah yang ada di Desa Wirata Agung. Potensi tersebut belum maksimal dimanfaatkan oleh warga desa, padahal apabila dapat dimaksimalkan atau ditingkatkan pemanfaatannya tentu saja akan berdampak baik bagi seluruh warga desa. Kebudayaan dalam hal kesenian ini membedakan Desa Wirata Agung dengan desa-desa lainnya, serta memberikan corak khas Desa Wirata Agung.

2. Tinjauan tentang Peranan Kelompok Ibu PKK

a. Pengertian Peranan

Setiap manusia memiliki peranan yang berbeda sehingga membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Setiap orang mempunyai peran pada masing-masing situasi, dia akan berbeda bila menjadi ayah, berbeda lagi bila menjadi anak, menjadi guru, menjadi pedagang dan lain sebagainya.

Menurut Margono Slamet (1995: 15), peranan adalah “mencakup tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial”. Sedangkan menurut Gross Manson dan Mc Eachern (1995: 99), berpendapat bahwa peranan adalah “sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”.

Pengertian peranan di atas dikaji lagi oleh Soerjono Soekanto (2000: 268), menurutnya peranan adalah “aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran”. Menurut Soerjono Soekanto (2000: 269), Peranan tersebut menurutnya mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sesuai dengan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan adalah seperangkat harapan-harapan yang mencakup tindakan atau perilaku seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang diberikan kedudukan dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus sesuai dengan peranannya dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan

diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

b. Pengertian Kelompok Ibu PKK

Salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa dan kelurahan adalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara umum adalah:

1. Usaha untuk membuat (merekayasa) masyarakat atau keluarga menjadi kuat dan mampu (berdaya) untuk berbuat atau berpartisipasi dalam kehidupan bersama dengan mengefektifkan, memberikan peluang atau dukungan, dan bantuan dalam segala aspek kehidupan (poleksoshankambud).
2. Usaha untuk mempertemukan berbagai unsur atau komponen dalam suatu kerjasama agar menjadi kekuatan yang utuh (sinergis) dalam rangka mewujudkan tujuan tim penggerak.

“Secara khusus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diartikan sebagai gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri”. (webmaster PKK Jaksel,

2007: 1). Sedangkan menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1981 dalam C.S.T Kansil “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu gerakan pembangunan melalui keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai peran utamanya”. (C.S.T Kansil, 1988: 54).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kelompok Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah suatu kelompok gerakan pembangunan secara nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.

c. Tujuan dan Sasaran Kelompok Ibu PKK

1. Tujuan Kelompok Ibu PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Dari batasan penjelasan mengenai PKK tersebut, jelaslah bahwa tujuan gerakan PKK adalah mewujudkan keluarga sejahtera. Sejahtera dalam hal ini yaitu, keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan

keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bagi khalayak umum, bila kita menyebut PKK maka yang terbayang adalah masak-memasak, menjahit menyulam dan merangkai bunga. Tujuan dari PKK lebih luas dari bayangan tersebut, tujuan dari Kelompok Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dikaitkan dengan perempuan, dan memang sebenarnya diarahkan kepada keluarga. Menurut Julia Suryakusuma (2012: 189), bahwa:

Keluarga mendukung masyarakat dan negara dengan tiga cara: pertama sebagai unit ekonomi, tempat melakukan reproduksi, pembentukan tenaga kerja, dan juga sebagai area konsumsi; kedua, sebagai unit biososial tempat hubungan ibu, bapak dan anak diberi konstruksi sosial; ketiga, keluarga menyediakan tempat pembentukan unit ideologis, yaitu sistem nilai, kepercayaan, tradisi sosial dan budaya yang ditanamkan sejak kanak-kanak.

Dengan demikian negara tidak keliru, jika senantiasa menekankan pentingnya keluarga dan memusatkan kegiatan PKK pada perempuan sebagai mediator dengan keluarga.

2. Sasaran Kelompok Ibu PKK

Visi Gerakan PKK adalah terwujudnya keluarga sejahtera untuk menuju masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, partisipatif, dan sadar hukum. Sedangkan misi Gerakan PKK yaitu memberdayakan masyarakat dan menciptakan kondisi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sehingga mampu membangun dirinya berdasarkan potensi, kebutuhan aspirasi dan kewenangan yang ada.

Pemberdayaan masyarakat akan terwujud bila ada upaya untuk memberdayakan keluarga. Maksud dari pemberdayaan keluarga adalah “segala upaya yang bersifat *non-instruktif* guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan mengambil keputusan untuk melakukan pemecahan dengan benar, tanpa atau dengan bantuan pihak lain”. (Panduan Pemberdayaan Masyarakat, 1999: 2).

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka ditetapkanlah sasaran Kelompok Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) antara-lain:

- a. Mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat, dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Fisik mental, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja atau berusaha yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan pengetahuan dan keterampilan. (Pedoman Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan Tahun 1996/1997 : 1).

d. Peranan Kelompok Ibu PKK

Dasar hukum yang melandasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) adalah :

1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
3. Keputusan Rakernas V PKK Nomor 02/KEP/Rakernas V/PKK/IV1998 tanggal 18 April 1998 tentang Pedoman Pengelolaan Gerakan PKK.
4. Kesepakatan Rakernas Luar Biasa (Rakernaslub) PKK Tahun 2000 tanggal 21 Oktober s/d 2 Nopember Tahun 2000.
5. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak PKK Pusat Tahun 2001.
6. Hasil Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005. (Tim Penggerak PKK Pusat: 2005).

Dasar hukum tersebutlah yang melandasi gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di dalam melaksanakan peran dan program-program pokok PKK.

Peranan wanita atau kelompok ibu dalam Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) antara lain:

Pendidikan buta aksara (melek huruf), peningkatan gizi masyarakat, pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemanfaatan tanah pekarangan, perkoperasian dan wiraswasta, pelestarian lingkungan hidup, penyuluhan dan pembinaan keterampilan-keterampilan khusus yang bertujuan untuk menambah penghasilan keluarga. (Nani Soewondo, 1984: 190).

Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di dalam melaksanakan tugas-tugasnya memiliki suatu program. Program PKK ini mempunyai jangkauan luas dan rumit, hal ini dijelaskan dalam Julia Suryakusuma (2012: 192), “program PKK mencakup ideologi negara dan

program pembangunan pemerintah: 1) P4; 2) gotong royong; 3) pangan; 4) sandang; 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; 6) pendidikan dan keterampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; 10) perencanaan sehat". Program-program ini dirancang agar sesuai dengan pembangunan dan tujuan ideologis negara.

Peranan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam melaksanakan programnya mempunyai kebijakan, strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga yang merupakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penulis di dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan acuan skripsi yang relevan, yang dalam penelitiannya menjelaskan tentang peranan kelompok ibu Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Judul Skripsi : Peranan Kelompok Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup di Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Tahun 2007.

Penulis : Weni Emelda Yusnita.

Jenis analisis : Analisis tentang Peranan.

Rumusan masalah : Bagaimanakah peranan kelompok Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup di Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Tahun 2007?

Teori Penelitian : Teori yang digunakan yaitu teori peran oleh Biddle dan Thomas.

Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Hasil dan Pembahasan: Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu objek secara sistematis, faktual dan akurat tentang berbagai fakta atau keadaan dari sifat-sifat populasi. Indikator memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan termasuk dalam kategori sangat berperan. Melakukan penghijauan lingkungan kategori cukup berperan, melaksanakan kebersihan lingkungan kategori sangat berperan, melaksanakan pertemuan rutin masuk dalam kategori belum berperan secara maksimal. Upaya menanam dan memelihara pohon sudah cukup berperan, memelihara kebersihan lingkungan masuk dalam kategori sudah dilaksanakan dengan baik, upaya penghematan energi sudah cukup berperan dan upaya pemanfaatan tanaman boga dan toga masuk dalam kategori cukup berperan.

Kesimpulan : Peranan Kelompok Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya melestarikan lingkungan hidup di kelurahan Sukamenanti kecamatan Kedaton Bandar Lampung tahun 2007 memiliki kategori cukup berperan yang paling dominan. Untuk indikator memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan, melakukan penghijauan lingkungan, upaya menanam dan memelihara pohon, penghematan energi dan pemanfaatan tanaman boga dan toga termasuk dalam kategori cukup berperan. Sementara, untuk indikator melaksanakan pertemuan rutin dikategorikan belum berperan sedangkan indikator melaksanakan dan upaya memelihara kebersihan dikategorikan sangat berperan.

Analisis persamaan dan perbedaan penelitian: persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini antara-lain; meneliti tentang peranan kelompok PKK, jumlah sampel dalam penelitian ini 36 orang, menggunakan metode penelitian deskriptif. Sedangkan perbedaannya antara lain; variabel terikat, kerangka pikir, definisi operasional variabel dan indikatornya, pembahasan serta kesimpulan.

C. Kerangka Pikir

Peranan Perempuan dalam pembangunan bangsa saat ini mencakup aspek yang luas. Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah kegiatan kaum ibu/wanita yang berpotensi cukup besar dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang kebudayaan.

Keterampilan perempuan dalam hal sosial dan budaya dikembangkan untuk mempertinggi harkat dan martabat perempuan serta perannya dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan dapat mengembangkan keterampilannya dengan cara memanfaatkan potensi lokal yang ada.

Kelompok ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ada di Desa Wirata Agung memiliki keterampilan dalam bidang kebudayaan, seperti mereka memiliki kelompok Gamelan Gong Bali, memiliki keterampilan untuk menarikan Tarian Bali dan memiliki keterampilan membaca Kidung Bali. Meskipun mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi tetapi dengan keterampilan yang mereka miliki dapat membantu melestarikan kebudayaan lokal atau daerah di Desa Wirata Agung.

Peranan kelompok Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di bidang kebudayaan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata antara-lain: memotivasi anak-anak muda yang ada di Desa Wirata Agung agar tahu dan cinta terhadap kebudayaan daerahnya, memotivasi para orang tua di desa tersebut agar peduli

terhadap kebudayaan daerah yang dimiliki dan melalui tindakan menggerakkan seluruh masyarakat Desa Wirata Agung dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah.

Semua tindakan tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan potensi kebudayaan daerah Desa Wirata Agung. Adapun tujuan dalam pemanfaatan potensi kebudayaan daerah tersebut antara-lain: agar warga desa memiliki pengetahuan tentang potensi kebudayaan yang dimiliki oleh desa tersebut, memiliki keterampilan yang memadai dalam bidang kebudayaan daerah dan memiliki kesadaran pentingnya melestarikan kebudayaan daerah di Desa Wirata Agung.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat digambarkan paradigma sebagai berikut:

